

LAPORAN PENELITIAN

KAJIAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL YANG BERDAYA SAING DALAM MENGHADAPI ERA INDUSTRY 4.0 DI PROPINSI JAWA BARAT



Oleh :

Ketua : Nurdiana Mulyatini., S.E.,M.M

Anggota : Mukhtar Abdul Kader, S.E.,M.M

**DIBIYAI OLEH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS GALUH TAHUN ANGGARAN 2018**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS GALUH
Mei, 2018**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN DENGAN PENDANAAN LPPM UNIGAL**

1. a. Judul Penelitian : **Kajian Pengembangan Koperasi Dan Usaha Kecil Yang Berdaya Saing Dalam Menghadapi Era Industry 4.0 Di Propinsi Jawa Barat**

b. Bidang Ilmu : Manajemen

2. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap dan Gelar : Nurdiana Mulyatini., S.E.,M.M

b. NIK : 03.3112770079

c. Pangkat/Golongan : Penata / IIIc

d. Jabatan Fungsional : Lektor

e. Jabatan Struktural : Dekan Fakultas Ekonomi

f. Fakultas / Program Studi : Manajemen

g. Pusat Penelitian : LPPM Universitas Galuh

3. Anggota Peneliti :

No.	Nama dan Gelar	NIK	Bidang Keilmuan	Fakultas
1	Mukhtar Abdul Kader., SE.,M.M	03.3112770493	Manajemen	Ekonomi

4. Lokasi Penelitian : Jawa Barat

5. Kerjasama dengan Instansi Lain:

a. Nama :

b. Alamat :


6. Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan

7. Biaya yang dibelanjakan : Rp. 5.000.000

Mengetahui,
Dekan

DR. Ani Rosliyati, S.E., M.M., Ak., CA.
NIK. 03.3112770074

Ciamis, 6 Mei 2018
Ketua Peneliti,


Nurdiana Mulyatini., S.E.,M.M
NIK. 03.3112770079

Menyetujui
Ketua LPPM Unigal,




Dr. Maman Herman, M.Pd.
NIK. 3112770252

RINGKASAN

Sebanyak 24.048 koperasi dan UMK di Jawa Barat yang aktif atau rerata 62.60% dan 37.40% dan yang masih tergolong tidak aktif, hal ini mengindikasikan bahwa koperasi dan usaha mikro kecil belum mampu bersaing dengan badan usaha lainnya dimana salah satunya penggunaan teknologi dan jaringan internet sebagai ciri era industri 4.0 memerlukan cara dan strategi yang memanfaatkan teknologi tersebut. Ketidakmampuan tersebut akan menyebabkan tingginya angka pengangguran yang selanjutnya menyebabkan kemiskinan baru di masyarakat. Pada Tahun 2017 Jawa Barat jumlah masyarakat miskin 4.168.440 atau 8.71% dan berada pada peringkat ke 19 dari 34 Propinsi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1.) Bagaimana Koperasi dan Usaha Kecil Mikro di Propinsi Jawa Barat. 2). Bagaimana strategi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Propinsi Jawa Barat untuk menghadapi era industri 4.0. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode field study atau study literatur dengan menggunakan data sekunder dan teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis deskriptif dan analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*). Hasil penelitian ini sebagai berikut : 1) Koperasi di propinsi Jawa Barat berjumlah 24.048 yang tersebar di 27 kabupaten kota, yang paling aktif Kabupaten Karawang dan yang paling tidak aktif Kabupaten Cirebon dan 73% dikuasai oleh koperasi Konsumen. 2). Usaha Mikro Kecil (UMK) berjumlah 4,5 Juta usaha atau 98.84 persen non pertanian. UMK di dominasi oleh Perdagangan besar dan eceran, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum serta Industri Pengolahan sedangkan yang paling sedikit adalah Jasa Perusahaan dan Pendidikan. UMK merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak yaitu 9 juta tenaga kerja dan UMK penyerap tenaga kerja terbanyak dari perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil, sepeda motor mencapai 3,98 Juta Jiwa. 3). Melalui Analisis IFAS dan EFAS strategi yang harus diterapkan pada koperasi dan UMK adalah memanfaatkan kekuatan dari peluang yang dimiliki (SO Strategy) dan memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman yang ada (ST Strategy).

Keyword : Pengembangan Koperasi; Pengembangan Usaha Kecil; Koperasi dan UMK Berdaya Saing, *Industry 4.0*; Analisis *SWOT*

KATA PENGANTAR

Laporan Penelitian ini menjelaskan tentang Bagaimana pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang Berdaya Saing Dalam menghadapi era industry 4.0. yang dananya berasal dari LPPM Universitas Galuh. Penelitian ini memuat uraian tentang penelitian Pengembangan Koperasi dan Usaha mikro yang didalamnya memuat penjelasan rinci tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan, Kajian Pustaka, Metode yang digunakan sampai dengan rincian/rekapitulasi anggaran kegiatan.

Laporan Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan penilaian pelaksanaan kegiatan penelitian yang akan kami laksanakan di propinsi Jawa Barat Khususnya Indonesia Umumnya yang memfokuskan pada Koperasi dan Usaha Mikro yang sudah harus mempersiapkan diri menghadapi perubahan perubahan yang mencirikan globalisasi dan era industry 4.0.

Atas terbitnya laporan Penelitian ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan Fakultas dan anggota atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun sampai dengan penyampaian Laporan Penelitian kepada LPPM Universitas Galuh.

Ciamis, 08 Mei 2018

TIM Penyusun Laporan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK/RINGKASAN.....	v
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	5
A. Koperasi	5
B. Usaha Kecil	5
C. Daya Saing	6
D. Era Industry 4.0.....	8
BAB III. METODE PENELITIAN	11
A. Metode yang Digunakan.....	11
B. Penentuan Lokasi dan Sasaran Penelitian	11
C. Data dan Sumber Data yang Diperlukan	11
D. Teknik Pengumpulan Data.....	12
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	13
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	16
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	16

B. Hasil dan Pembahasan.....	18
B.1. Koperasi di Propinsi Jawa Barat.....	18
B.2. Usaha Micro Kecil di Propinsi Jawa Barat.....	21
B.2.1 UMK Mendominasi Jumlah Usaha di Jawa Barat.....	22
B.2.2 UMK Sebagai Penyerap Tenaga Kerja Terbanyak.....	24
B.2.3 UMK di Kelola secara Sederhana.....	26
B.2.4 Pelaku UMK Mayoritas Perorangan.....	28
B.2.5 Kinerja Usaha dari Sisi Keuangan.....	29
B.3. Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang berdaya saing di Propinsi Jawa Barat untuk menghadapi era industri 4.0.....	30
 BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	39
A. Simpulan.....	39
B. Saran.....	40
 DAFTAR PUSTAKA.....	41

Lampiran-Lampiran :

- Lampiran 1: Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi 2006-2016
- Lampiran 2: Jumlah Penduduk per propinsi di indonesia
- Lampiran 3: Data Koperasi per 31 desember 2015
- Lampiran 4: Perkembangan Usaha Mikro, kecil dan menengah tahun 2016 – 2017
- Lampiran 5: Potensi Usaha Mikro Kecil Provinsi Jawa Barat

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Diagram Matriks SWOT (Fredy Rangkuti, 2006)	22
Tabel 2. Penerima Penghargaan Atau Jasa Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017	24
Tabel 3. Jumlah dan Persentase UMK Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2016	32
Tabel 4. Jumlah Usaha, Tenaga Kerja dan Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Non Pertanian Menurut Kategori di Jawa Barat, 2016	34
Tabel 5. Kekuatan dan Kelemahan Internal	39
Tabel 6. Matriks IFAS (Internal Factors Analysis Summary)	40
Tabel 7. Peluang dan Ancaman Eksternal	41
Tabel 8. Matriks EFAS (Eexternal Factors Analysis Summary)	42
Tabel 9. Penjabaran IFAS dan EFAS	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Tiga Aspek Integrasi Industri 4.0 (Kagermenn dkk, 2013)	15
Gambar 2.2. Level Industri 4.0	16
Gambar 4.1. Sebaran Koperasi tiap Kabupaten kota Tahun 2017	25
Gambar 4.2. Sebaran Koperasi dari yang terbanyak	25
Gambar 4.3. Perkembangan Koperasi 2006 – 2016	26
Gambar 4.4. % Koperasi Aktif di Jawa Barat Tahun 2017	27
Gambar 4.5. Koperasi berdasarkan jenisnya Jawa Barat Tahun 2017.....	27
Gambar 4.6. Persentase Jumlah UMK Menurut Kategori, 2016	31
Gambar 4.7. Tingkat Pengangguran Jawa Barat menurut Pendidikan, 2017	33
Gambar 4.8. Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Badan Hukum, 2016	35
Gambar 4.9. Rasio Pendapatan terhadap pengeluaran Menurut Lapangan Usaha, 2017	39
Gambar 4.10. Kuadran SWOT	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi kerakyatan melekat pada koperasi, hal ini sudah sejak lama bahkan sejak jaman penjajahan belanda koperasi sudah ada di bumi nusantara ini. Koperasi didirikan bermula dari kebersamaan dan pemerataan ekonomi masyarakat ini terlihat pada salah satu pasal yang terdapat dalam undang undang koperasi 2012 yang menyatakan bahwa setiap anggota adalah pemilik koperasi. Hampir di setiap desa di indonesia terdapat koperasi bahkan saat ini dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Desa. Jumlah koperasi di Jawa Barat Tahun 2017 mencapai 25.744 yang tersebar di 26 kabupaten dan kota. Dari Jumlah tersebut rata –rata koperasi aktif 62,98% sisanya 37,02 persen tidak aktif. (BPS Jawa Barat 2017). Hal ini menunjukkan bahwa koperasi belum bisa bersaing secara optimal dengan badan usaha lainnya.

Selanjutnya begitu juga usaha kecil yang saat ini jumlahnya terjadi kenaikan di 10 tahun terakhir ini. Pada tahun 2006 jumlah Usaha kecil 4,21 Juta meningkat pada tahun 2016 4,63 Juta. Ini merupakan potensi ekonomi yang cukup besar yang perlu dipertahankan keberadaanya. Dilain pihak Angka kemiskinan di Jawa barat pada tahun 2017 dari 34 propinsi di indonesia dan berada di peringkat ke-3 jika dilihat Jumlah yaitu : 4.168.44 orang. Salah satu tugas kita adalah mengoptimalkan kinerja koperasi dan usaha kecil agar memiliki kinerja yang tinggi sehingga berimbas kepada penyerapan tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran. Untuk tetap bertahan koperasi dan usaha

mikro harus memiliki daya saing yang tinggi. Kekuatan utama untuk memiliki daya saing di Era industry 4.0 adalah memiliki hubungan jangka panjang yang baik dengan pemasok dan pelanggan serta pemanfaatan Teknologi Informasi.(Suhartono, 2011) Istilah Industri 4.0 sendiri secara resmi lahir di Jerman tepatnya saat diadakan Hannover Fair pada tahun 2011 (Kagermann dkk, 2011).

Negara Jerman memiliki kepentingan yang besar terkait hal ini karena Industri 4.0 menjadi bagian dari kebijakan rencana pembangunannya yang disebut High-Tech Strategy 2020. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempertahankan Jerman agar selalu menjadi yang terdepan dalam dunia manufaktur (Heng, 2013). Beberapa negara lain juga turut serta dalam mewujudkan konsep Industri 4.0 namun menggunakan istilah yang berbeda seperti Smart Factories, Industrial Internet of Things, Smart Industry, atau Advanced Manufacturing. Meski memiliki penyebutan istilah yang berbeda, semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan daya saing industri tiap negara dalam menghadapi pasar global yang sangat dinamis. Kondisi tersebut diakibatkan oleh pesatnya perkembangan pemanfaatan teknologi digital di berbagai bidang. (Prasetyo & Sutopo, 2018)

Tantangan lain dari industry 4.0 menurut Staf Khusus Menteri Perindustrian Benny Soetrisno mengatakan hambatan untuk mengimplementasikan industri 4.0 adalah konektivitas internet. Oleh karena itu, untuk penerapan industri 4.0 dibutuhkan dukungan teknologi. Untuk mempersiapkan kedatangan industri 4.0 salah satu kebijakan yang diambil Pemerintah adalah mengeluarkan RPJMN tahun 2015-2018 dimana salah satunya

berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan konektivitas jaringan internet antar pulau dengan menggunakan sistem Palapa Ring. Program ini akan membangun serat optik diseluruh Indonesia dengan panjang 13.000 kilometer, proyek ini diharapkan dapat membantu menghubungkan Indonesia dari sabang sampai merauke dengan koneksi internet yang stabil dan murah, sehingga industri 4.0 dapat dinikmati tidak hanya di Jawa, tetapi juga di Kalimantan, Maluku dan Papua, sehingga sumbangan tiap pulau besar di Indonesia ke GDP nasional dapat lebih seimbang, karena selama ini kue GDP Indonesia didominasi oleh Jawa dan Sumatera yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar pulau di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari strategi terbaik untuk mengembangkan Koperasi dan Usaha Kecil di Jawa Barat yang memiliki daya saing tinggi sehingga dapat bertahan hidup di era industri 4.0 ini. (Claiborne, Buckley, Parsonage, Ross, & Ward, 1995)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Koperasi dan Usaha Mikro Kecil di Propinsi Jawa Barat
- b. Bagaimana Strategi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Propinsi Jawa Barat untuk menghadapi era industri 4.0

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Bagaimana Koperasi dan Usaha Mikro Kecil di Propinsi Jawa Barat
- b. Bagaimana Startegi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Propinsi Jawa Barat untuk menghadapi era industri 4.0

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan penjelasan bagaimana Pengembangan Koperasi dan Usaha kecil di Propinsi Jawa Barat untuk menghadapi persaingan di era industri 4.0. Manfaat penelitian ini dijabarkan menjadi manfaat praktis dan teoritis. Manfaat Praktis bagi peneliti sebagai refrensi dan bahan pertimbangan khususnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengembangan koperasi dan usaha kecil yang berdaya saing di Propinsi Jawa Barat dan dapat digunakan Sebagai bahan informasi dan masukan untuk pengembangan koperasi dan Usaha kecil yang memiliki daya saing sehingga dapat bersaing di era industry 4.0 sedangkan manfaat teoritis bagi Pendidikan, Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan pendidikan ataupun refrensi dan pengetahuan bagi peneliti yang melakukan pengembangan penelitian selanjutnya dan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dalam pengembangannya dapat memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu bertahan hidup di era industri 4.0

BAB II.

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 1: “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”.

Sedangkan menurut Rudianto (2010: 11) definisi koperasi secara umum yaitu: “Koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis”. Sedangkan menurut Hendar (2010: 28) “koperasi adalah suatu organisasi bisnis yang para pemilik/anggotanya adalah juga pelanggan utama perusahaan tersebut.

Dari ketiga definisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang merupakan perkumpulan orang secara sukarela dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya.

2.2. Usaha Kecil

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah menjelaskan bahwa : usaha Mikro,

yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2.3. Daya Saing

Daya saing dikaitkan dengan tingkat output yang dihasilkan untuk setiap unit input yang digunakan atau disebut dengan produktivitas. Peningkatan produktivitas dilihat dari peningkatan modal dan tenaga kerja, kualitas input, dan 12 teknologi yang diterapkan. Menurut Frinces (2011), daya saing adalah hasil dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki dan nilai lebih oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan sesuatu, baik berupa jasa atau barang. Keunggulan berasal dari proses kerja yang dilakukan dengan kualitas yang baik dan konsep manajemen profesional diiringi dengan kontribusi sumber daya terbaik seperti bahan baku, kepemimpinan, keuangan yang cukup, SDM dan dukungan dari teknologi yang canggih.

Menurut Budiyanto (2013:47) adalah : “Manajemen sumber daya manusia memandang manusia dalam organisasi sebagai aset yang perlu dirawat, ditingkatkan kemampuan keterampilan dan 15 menjaga komitmennya dalam bekerja, hal-hal tersebut akan berdampak pada peningkatan daya saing yang unggul (competitive advantage).”

Daya saing diidentifikasi dengan masalah produktivitas, yakni dengan melihat tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan.

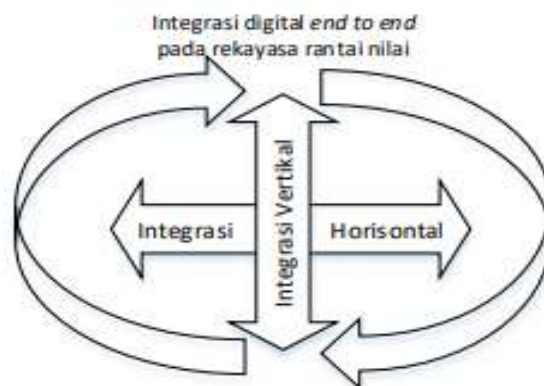
Meningkatnya produktifitas ini disebabkan oleh peningkatan jumlah input fisik modal dan tenaga kerja, peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi (Porter, 1990 dalam Abdullah, 2002). Pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur daya saing dilihat dari beberapa indikator yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, Menurut Tarigan (2005). Keunggulan komparatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang menurut perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah. istilah comparative advantage (keunggulan komparatif) mula-mula dikemukakan oleh David Ricardo (1917) sewaktu membahas perdagangan antara dua negara. Dalam teori tersebut, Ricardo membuktikan bahwa apabila ada dua negara saling berdagang dan masing-masing negara mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang bagi negara tersebut memiliki keunggulan yang komperatif maka kedua negara tersebut akan beruntung. Ternyata ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting di perhatikan dalam ekonomi regional.

Keunggulan kompetitif adalah suatu keunggulan yang dapat diciptakan dan dikembangkan. Ini merupakan ukuran daya saing suatu aktifitas kemampuan suatu negara atau suatu daerah untuk memasarkan produknya di luar daerah atau luar negeri. Maka dari itu, menurut Tarigan (2005) seorang perencana wilayah harus memiliki kemampuan untuk menganalisa potensi ekonomi wilayahnya. Dalam hal ini kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor ini memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.

2.4. Era Industry 4.0

Definisi mengenai Industri 4.0 beragam karena masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Kanselir Jerman, Angela Merkel (2014) berpendapat bahwa Industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Schlechtendahl dkk (2015) menekankan definisi kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain.

Pengertian yang lebih teknis disampaikan oleh Kagermann dkk (2013) bahwa Industri 4.0 adalah integrasi dari Cyber Physical System (CPS) dan Internet of Things and Services (IoT dan IoS) ke dalam proses industri meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya. CPS adalah teknologi untuk menggabungkan antara dunia nyata dengan dunia maya. Penggabungan ini dapat terwujud melalui integrasi antara proses fisik dan komputasi (teknologi embedded computers dan jaringan) secara close loop (Lee, 2008).



Gambar 2.1. Tiga Aspek Integrasi Industri 4.0 (Kagermann dkk, 2013)

Hermann dkk (2015) menambahkan bahwa Industri 4.0 adalah istilah untuk menyebut sekumpulan teknologi dan organisasi rantai nilai berupa smart factory, CPS, IoT dan IoS. Smart factory adalah pabrik modular dengan teknologi CPS yang memonitor proses fisik produksi kemudian menampilkannya secara virtual dan melakukan desentralisasi pengambilan keputusan. Melalui IoT, CPS mampu saling berkomunikasi dan bekerja sama secara real time termasuk dengan manusia. IoS adalah semua aplikasi layanan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pemangku kepentingan baik secara internal maupun antar organisasi.

Terdapat enam prinsip desain Industri 4.0 yaitu interoperability, virtualisasi, desentralisasi, kemampuan real time, berorientasi layanan dan bersifat modular. Berdasar beberapa penjelasan di atas, Industri 4.0 dapat diartikan sebagai era industri di mana seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara real time kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet dan CPS guna mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai baru ataupun optimasi nilai yang sudah ada dari setiap proses di industri.



Sumber : Baur & Wee, 2015
Gambar 2.2 Level Industri 4.0

Gambar 2 merupakan instrumen bagi perusahaan dalam mengimplementasikan industri 4.0 agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada gambar 2 komponen tenaga kerja (labor), harus memenuhi; 1) kolaborasi manusia dengan robot; 2) kontrol dan kendali jarak jauh; 3) manajemen kinerja digital; dan 4) otomasi pengetahuan kerja. Demikian pula pada komponen lainnya digunakan sebagai instrumen implementasi industri 4.0. Revolusi digital dan era disrupsi teknologi adalah istilah lain dari industri 4.0. Disebut revolusi digital karena terjadinya proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan di semua bidang. Industri 4.0 dikatakan era disrupsi teknologi karena otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. Salah satu karakteristik unik dari industri 4.0 adalah pengaplikasian kecerdasan buatan atau artificial intelligence (Tjandrawinata, 2016). Salah satu bentuk pengaplikasian tersebut adalah penggunaan robot untuk menggantikan tenaga manusia sehingga lebih murah, efektif, dan efisien.

BAB III.

METODE PENELITIAN

A. Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode field study atau biasa disebut study literatur. Field Study merupakan Metode untuk mengetahui berbagai macam cara dan strategi koperasi dan usaha kecil yang berdaya saing dalam menghadapi era industry 4.0 dari berbagai literatur baik buku maupun jurnal.

B. Penentuan Lokasi dan Sasaran Penelitian

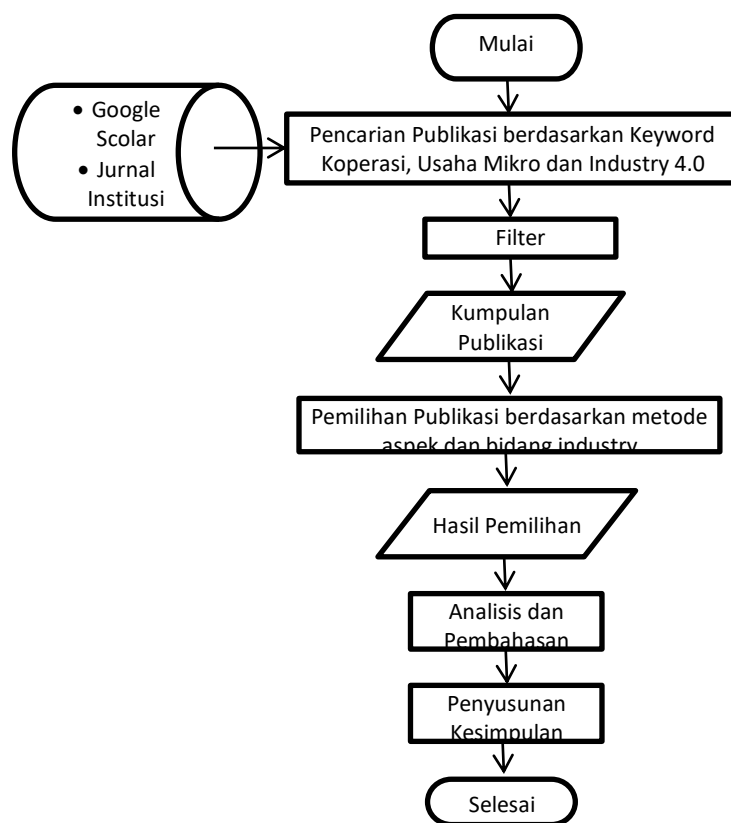
Jawa barat merupakan propinsi yang memiliki jumlah penduduk paling banyak di Indonesia, dari 261.890.900 jiwa (Bps 2018) dari 34 propinsi, jawa barat merupakan propinsi urutan yang pertama yakni 48.037.600 jiwa atau 18,3% penduduk indonesia. Pada tahun 2015 merupakan propinsi yang paling banyak koperasi yang tidak aktif yaitu 8.886. Jika dilihat dari jumlah koperasi aktif jawa barat tahun 2016 merupakan urutan yang 3 setelah jawa timur dan jawa tengah yakni dari 148.220, jawa barat terdapat 16,289 atau 10,99%. Dan menyumbangkan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 8.71%.

C. Data dan Sumber Data yang Diperlukan

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, yaitu rekapitulasi data Koperasi di 34 propinsi, Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah tahun 2016-2017, Koperasi Aktif Menurut Provinsi 2006-2016 dan jumlah penduduk per propinsi di indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, Tahap pertama adalah pengumpulan data publikasi menggunakan layanan google scholar, Kajian Instansi pemerintah berupa laporan laporan, jurnal nasional terakreditasi bahkan jurnal Nasional yang ada di setiap Universitas ternama di Indonesia. Google scholar adalah layanan yang memuat database abstrak dan sitasi dari berbagai literatur ilmiah meliputi jurnal, buku, dan prosiding. Bahkan bisa menggunakan scopus. Menurut lamannya (www.scopus.com), Scopus memiliki lebih dari 22,748 jurnal di berbagai bidang penelitian yang selalu diperbarui setiap harinya. Menurut Burnham (2006), Scopus mudah untuk digunakan bahkan untuk kalangan pemula sekalipun. Artikel ini memanfaatkan Scopus untuk mencari publikasi berdasar title/ judul 'Industry 4.0'. Hasil pencarian kemudian disaring dan di analisis. Tahapan Tersebut adalah sebagai berikut :



E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dengan menggunakan Analisis SWOT, Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencana strategis (*Strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan Analisis Situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah Analisis SWOT (Rangkuti, 2003). SWOT merupakan singkatan dari *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threat* (Ancaman). Metode ini merumuskan perencanaan yang strategis dengan menggunakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk dijadikan bahan evaluasi. Berdasarkan empat faktor itulah terbentuk akronim SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats). Sehingga analisis SWOT digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi (Jogiyanto, 2006). Berikut adalah penjelasan dari masing-masing SWOT yaitu:

1. Analisis *Strength*

Pada analisis strength (kekuatan) yaitu mengidentifikasikan kekuatan, situasi, kondisi ataupun sumber daya yang merupakan kekuatan bagi suatu

perusahaan ataupun organisasi pada saat ini. Hal ini dilakukan guna mengetahui kekuatan dari perusahaan agar dapat menyusun strategi yang dipersiapkan untuk meningkatkan daya saing terhadap kompetitor.

2. Analisis *Weakness*

Analisis weakness (kelemahan) merupakan analisis yang dilakukan untuk dapat mengidentifikasi kelemahan yang dimiliki perusahaan untuk dapat mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi akibat dampak dari kelemahan yang dimiliki.

3. Analisis *Opportunities*

Analisis opportunities (peluang) adalah suatu analisis untuk mengidentifikasi peluang yang dimiliki terhadap segmentasi pasar yang dimasuki oleh organisasi ataupun perusahaan. Secara garis besar cara ini untuk mencari peluang atau terobosan yang memungkinkan dapat membuat berkembangnya suatu organisasi ataupun perusahaan.

4. Analisis *Threats*

Analisis threats (ancaman) merupakan analisis yang mengidentifikasi adanya ancaman atau gangguan yang terjadi ataupun yang kemungkinan akan terjadi sehingga organisasi atau perusahaan dapat memprediksikan strategi yang akan dilakukan untuk masa ke depannya.

Tabel 1. Diagram Matriks SWOT (Fredy Rangkuti, 2006)

<p>Internal IFAS</p> <p>Eksternal EFAS</p>	<p>Strenght (S) Kekuatan</p> <p>Tentukan 5-10 faktor-faktor kekuatan Internal</p>	<p>Weakness (W) Kelemahan</p> <p>Tentukan 5-10 faktor-faktor Kelemahan Internal</p>
<p>Opportunities (O) Peluang</p> <p>Tentukan 5-10 faktor-faktor Peluang Eksternal</p>	<p>Strategi SO Menggunakan Kekuatan dengan memanfaatkan Peluang</p> <p>Strategi Turn Around (3) Meminimalisir Kelemahan Untk meraih Peluang</p>	<p>Strategi WO Mengatasi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang</p> <p>Strategi Agresif (1) Memanfaatkan Peluang dan Kekuatan yang ada</p>
<p>Threats (T) Ancaman</p> <p>Tentukan 5-10 faktor-faktor Ancaman Eksternal</p>	<p>Strategi ST Menggunakan Kekuatan untuk menghindari Ancaman</p> <p>Strategi Dfensif (4) Meminimalisir Kelemahan dan bertahan Terhadap Ancaman Luar</p>	<p>Strategi WT Meminimalkan Kelemahan dan menghindari ancaman</p> <p>Strategi Diversifikasi (2) Memanfaatkan Kekuatan Untuk menghadapi Ancaman Luar</p>

Untuk dapat menghitung posisi kuadran dari analisis SWOT maka diperlukan kombinasi antara bobot dan rating.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Propinsi Jawa Barat terdiri dari 27 Kabupaten Kota memiliki luas wilayah 35.377,76Km², 626 Kecamatan dan 5.962 Kel./Desa. (BPS Propinsi Jawa Barat). Pada tahun 2017 Propinsi Jawa Barat pada prioritas Nasional Penanggulangan kemiskinan yang selanjutnya kementrian koperasi dan UMKM memprioritaskan penanggulangan kemiskinan melalui program daya saing UMKM dan Koperasi. Kegiatan prioritas kementerian tersebut terdiri dari 5 yaitu 1). Koperasi dan kemitraan usaha, 2). Peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, 3). Pengembangan kewirausahaan, 4). Pengembangan keterampilan dan layanan usaha dan 5). Perluasan akses pembiayaan. Kegiatan ke 5 prioritas tersebut di Propinsi Jawa Barat di jabarkan sebagai berikut :

- 1). Koperasi dan Kemitraan Usaha : a). Petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL), b). Satuan tugas pengawas koperasi, c). Kemitraan antara UMKM dengan perusahaan retail modern.
- 2). Peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran : a). Cooperative Fair, b). Pemasaran Produk berbasis digital, c). Pameran produk usaha kecil, d). Fasilitasi Pameran dan Promosi (Fasilitas Smesco galery). e). Pelatihan dan peningkatan manajemen, kualitas dan pemasaran produk.
- 3). Pengembangan kewirausahaan : a). Penciptaan Wirausaha baru, b) Peningkatan kapasitas SDM Usaha Kecil
- 4). Pengembangan keterampilan dan layanan usaha : a). Operasional Pusat layanan usaha terpadu (Plut). b). Pelatihan untuk UMKM dan Koperasi.

- 5). Perluasan akses pembiayaan : a). Peningkatan akses pembiayaan UMKM dan Kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM. b). Kerjasama UMKM dengan perbankan dan CSR.

Prestasi Propinsi Jawa Barat di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Tahun 2017 dari Menteri Koperasi.

Tabel 2. Penerima Penghargaan Atau Jasa Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017

No.	Nama	JABATAN
1	H. Omang Rohmanudin	Ketua KOPTI Kuningan Kab. Kuningan
2	Roni Abdurahman Sopa, SE	Ketua KUD Bayongbong Kab. Garut
3	Drs. H. Azis Sholeh, M.Ag	Ketua KOHIPPCI Kota Bandung
4	H. Rudi Gunawan, SH., MA., MP	Bupati Garut
5	H. Acep Purnama, SH., MH	Bupati Kuningan
6	H. Uu Ruzhanul Ulum, SE	Bupati Tasikmalaya
7	Ir. H. Sofian Nataprawira, MP	Sekretaris Daerah Kab. Bandung
8	H. Iman Alirahman. SH., M.Si	Sekretaris Daerah Kab. Garut
9	Eric Muhammad Atthauriq, SH	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung
10	Drs. H. Dicky Rubiana Abdullah, M.M	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Sumedang
11	Dr. Hj. Netty Prasetiani Heryawan	Ketua Penggerak PKK
12	Dr. Yuanita Indriani	Wakil Rektor Riset Kerjasama IKOPIN Bandung
13	Kiki Gumelar, S.ST	Pemilik UKM Chocodot Kab. Garut
14	Andris Wijaya	Pemilik UKM Liwet Instan Seribu Satu Kab. Garut
15	KH. Abdullah Gymnastiar	Pembina Koppotren Daarut Tauhid Kota Bandung
16	Dr. Agus Haryono, M.Sc	Pembina Koperasi Bina Kimia LIPI Kota Bandung
17	Bambang Soenarmo	Ketua Koperasi Karyawan Saraswati Kota Bandung
18	H. Undang Zarkasie	Ketua Pondok Pesantren Al Amin Tasukmalaya
19	Asep Sudrajat	Ketua KSPPS BMT Mardlotillah Jabar-Banten Kab. Bandung
20	Drs. H. Awan Sanusi, M.Pd	Ketua KPRI Mekar Kec. Cisurupan Kab. Garut Jawa Barat
21	Dudum Jamlat Ilyas	Ketua KSP Rukun Ikhtiar Kota Bandung Jawa Barat
22	H. Dase Darossalam Hermanto	Ketua Koperasi Pengusaha Kecil Pedagang Sayur Mayur Mulya Bandung Barat Jawa Barat
23	Hj. Tjutju Hayati	Ketua Koperasi Wanita Bunga Tanjung Bandung Barat Jawa Barat
24	Iwan Setiawan	Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Bogor Jawa Barat

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Barat 2017

B. Hasil dan Pembahasan

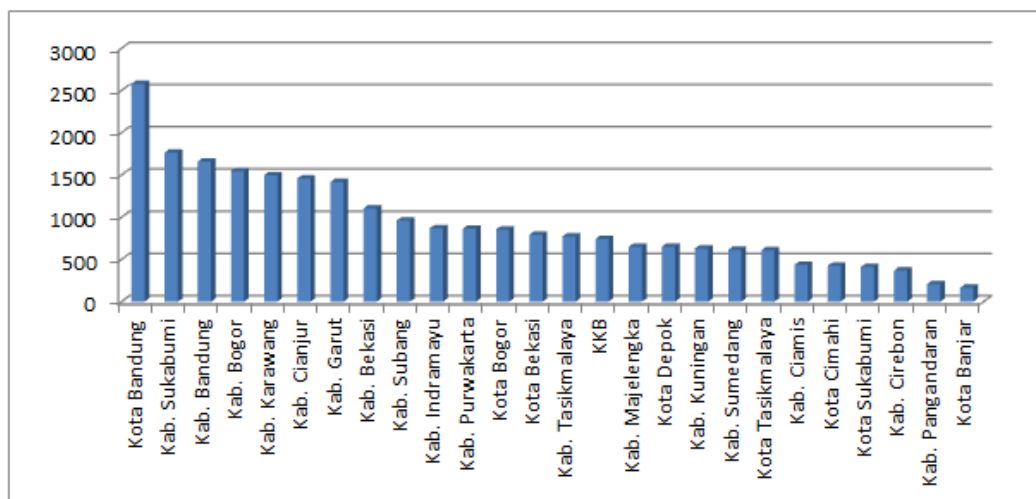
B.1. Koperasi di Propinsi Jawa Barat

Koperasi di Jawa Barat berjumlah 24.048 yang tersebar di 27 Kabupaten kota, sebarannya dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 4.1. Sebaran Koperasi tiap Kabupaten kota Tahun 2017

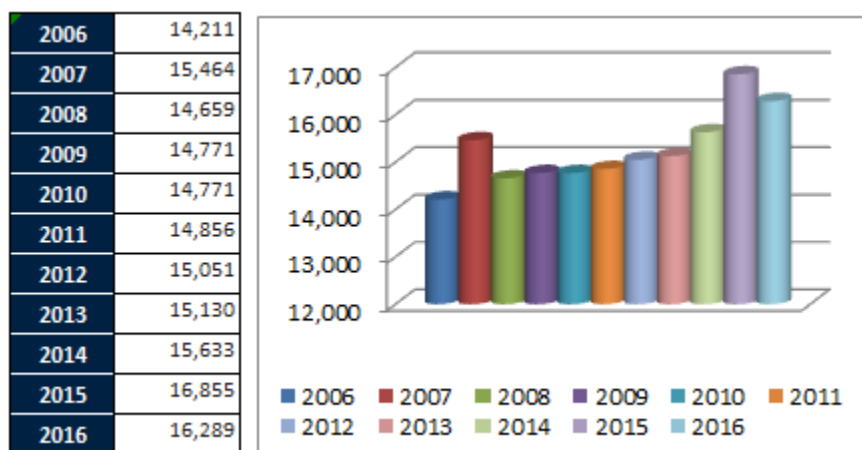
Jika diurutkan berdasarkan jumlah koperasi mulai yang terbanyak sampai dengan yang paling sedikit dapat terlihat sebagai berikut :



Sumber : Data Olahan 2018

Gambar 4.2. Sebaran Koperasi dari yang terbanyak

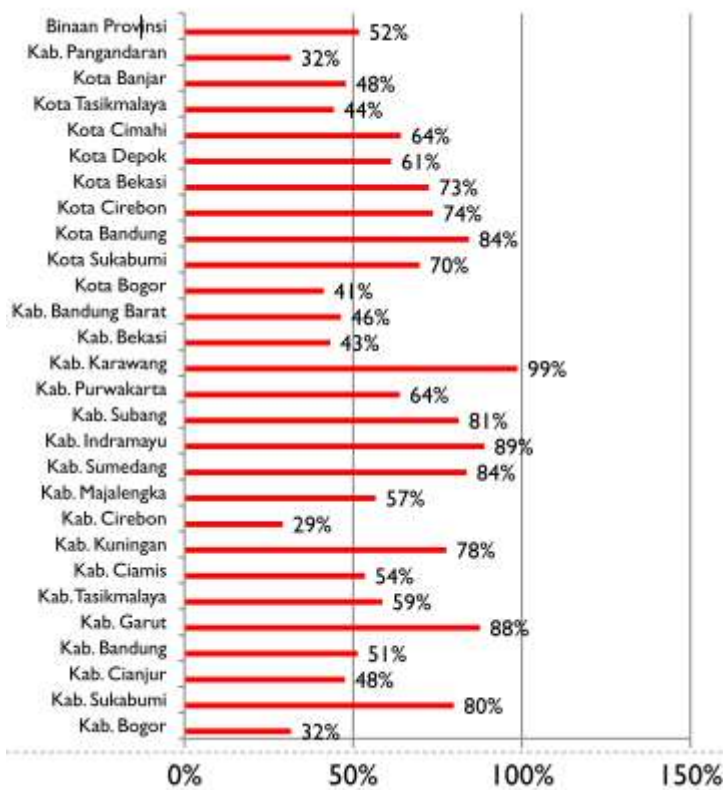
Kota Bandung merupakan yang terbanyak sebanyak 2.577 dan yang paling sedikit adalah kota banjar sebanyak 165. Perkembangan koperasi di Propinsi Jawa Barat secara keseluruhan dari tahun ketahun mengalami fruktuasi namun cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data BPS Update Terakhir 25 Jun 2018 bahwa propinsi Jawa Barat merupakan urutan ke 3 di Indonesia terbanyak koperasi aktifnya. Perkembangan koperasi aktif di Jawa Barat dapat kita lihat 10 tahun terakhir sebagai berikut :



Sumber : Data olahan 2018

Gambar 4.3. Perkembangan Koperasi 2006 – 2016

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa perkembangan koperasi di Propinsi Jawa Barat terus meningkat walaupun pada tahun 2016 menurun. Perkembangan koperasi di Jawa Barat tidak lepas dari peran serta koperasi di berbagai kabupaten dan kota, berikut persentase koperasi aktif di Jawa Barat pada Tahun 2017.

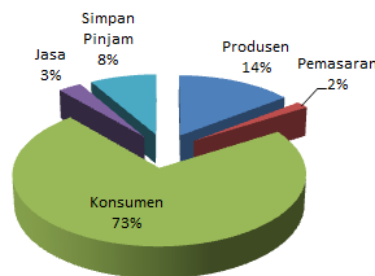


Dari 27 Kabupaten kota Propinsi Jawa Barat + Koperasi Binaan terlihat persentase keaktifan yang berbeda beda, Rata rata keaktifan secara keseluruhan 62.60% paling tinggi 99% oleh Kab. Karawang dan paling rendah 29% di Kab. Cirebon

Sumber : Data ODS(online Data Sistem) BPS 2017
 Gambar 4.4. % Koperasi Aktif di Jawa Barat Tahun 2017

Sedangkan koperasi berdasarkan jenisnya (produsen, pemasaran, konsumen, jasa dan simpan pinjam) dapat dilihat pada data berikut :

Jenis Koperasi	Jumlah
Produsen	3,740
Pemasaran	410
Konsumen	18,703
Jasa	767
Simpan Pinjam	2,154



Sumber : Data diolah 2018
 Gambar 4.5. Koperasi berdasarkan jenisnya Jawa Barat Tahun 2017

Ini dapat disimpulkan bahwa koperasi di Jawa Barat di dominasi oleh koperasi konsumen sebesar 73%

B.2 Usaha Micro Kecil di Propinsi Jawa Barat

Dunia usaha di Jawa Barat pada saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari hasil SE2016 Lanjutan, jumlah usaha ini mencapai lebih dari 4,5 juta usaha atau 98,84 persen dari total usaha nonpertanian di Jawa Barat. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja Jawa Barat lebih dari 9,7 juta orang atau sekitar 74,07 persen dari total tenaga kerja nonpertanian. Ketika krisis menerpa Indonesia termasuk Jawa Barat pada sekitar tahun 1997-1998, UMK terbukti tetap berdiri kokoh di saat usaha-usaha besar lainnya berjatuh. Keunggulan UMK dalam bertahan dari badai krisis karena berbagai alasan. Pertama, umumnya UMK menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, UMK tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Ketiga, umumnya bisnis UMK menggunakan modal relatif rendah. Dengan keunggulan tersebut, UMK tidak begitu merasakan pengaruh krisis global yang biasanya ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah yang dalam. Meskipun mempunyai beberapa keunggulan, UMK juga mempunyai banyak keterbatasan sehingga usaha ini tidak mampu untuk berkembang. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya minimnya akses perbankan; kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah; dikelola dengan cara yang sederhana; penggunaan teknologi yang terbatas; dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang berorientasi ekspor.

Dari hasil SE2016 Lanjutan, jumlah usaha ini mencapai lebih dari 4,5 juta usaha atau 98,84 persen dari total usaha nonpertanian di Jawa Barat. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja Jawa Barat lebih dari 9,7 juta orang atau sekitar 74,07 persen dari total tenaga kerja nonpertanian. Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi jumlah UMK dengan jumlah sekitar 2,1 juta usaha atau mencapai 47,44 persen. Usaha Industri Pengolahan (Kategori C) dan usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) juga mempunyai kontribusi yang besar, masing-masing sejumlah 860.312 usaha (18,93 persen) dan lebih 600.720 usaha (lebih dari 13,12 persen).

B.2.1 UMK Mendominasi Jumlah Usaha di Jawa Barat

UMK mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Jawa Barat. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan sebagai wadah usaha yang menghasilkan nilai ekonomi. Usaha ini menjadi pilihan utama karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu aktivitas UMK merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dengan kata lain, UMK berperan sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan. Persentase UMK di Jawa Barat mencapai 98,84 persen dari total jumlah usaha nonpertanian di Jawa Barat. Jumlah UMK tersebar pada semua kategori nonpertanian.



Sumber : BPS, SE2016-*Lanjutan*
 Gambar 4.6. Persentase Jumlah UMK Menurut Kategori, 2016

Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi jumlah UMK dengan jumlah sekitar 2,1 juta usaha atau mencapai 47,44 persen. Usaha Industri Pengolahan (Kategori C) dan usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) juga mempunyai kontribusi yang besar, masing-masing sejumlah 860.312 usaha (18,93 persen) dan lebih 600.720 usaha (lebih dari 13,21 persen). Konsentrasi UMK tersebar pada masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat. Terdapat tiga kabupaten/kota yang persentase UMKnya lebih dari 7 persen terhadap total UMK Jawa Barat. Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung memiliki kontribusi sebesar 22,99 persen total UMK Jawa Barat.

Tabel 3. Jumlah dan Persentase UMK Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2016

Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase (%)
Kab. Bogor	367.271	8,08
Kab. Bandung	347.573	7,65
Kota Bandung	330.314	7,27
Kab. Sukabumi	266.729	5,87
Kab. Garut	258.314	5,68
Kab. Cirebon	249.823	5,50
Kab. Cianjur	249.061	5,48
Kab. Karawang	229.031	5,04
Kab. Bekasi	227.110	5,00
Lainnya	2.020.648	44,45
Total	4.545.874	100,00

Sumber : BPS, SE2016-Lanjutan

B.2.2 UMK Sebagai Penyerap Tenaga Kerja Terbanyak

Jumlah UMK sangat besar di Jawa Barat tentunya akan berperan untuk menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017, pengangguran di Jawa Barat mencapai 8,22 persen, terbanyak pada lulusan SMK yang mencapai 16,80 persen. Tingginya kontribusi lulusan SMK terhadap jumlah pengangguran di Jawa Barat, salah satunya disebabkan rendahnya keahlian soft skill lulusan SMK khususnya di SMK yang kualitas pendidikannya belum teruji. Selain SMK, pengangguran juga banyak terjadi pada lulusan SMA yang mencapai 10,03 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pengangguran cukup banyak terjadi pada angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah. Pembekalan keterampilan bagi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah ini akan menjadi aksi yang sangat strategis agar mereka mampu menciptakan usaha sendiri.



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat Agustus 2017, dan Berita Resmi Statistik No. 64/11/2017

Gambar 4.7. Tingkat Pengangguran Jawa Barat menurut Pendidikan, 2017

UMK merupakan salah satu wadah yang paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki skill tinggi. Data SE2016 memberikan informasi bahwa UMK telah menyerap lebih dari 9 juta tenaga kerja, atau sekitar tiga perempat tenaga kerja nonpertanian di Jawa Barat. Penyerapan tenaga kerja UMK terjadi paling banyak pada usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (kategori G) mencapai 3,98 juta jiwa atau mencapai dua perlima dari tenaga kerja pada UMK non pertanian. Usaha Industri Pengolahan (Kategori C) dan penyediaan akomodasi dan penyediaan Makan Minum (Kategori I) menempati Urutan Kedua dan Ketiga dalam penyerapan tenaga kerja pada UMK nonpertanian. Secara rata-rata per usaha, UMK kategori Konstruksi memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi yaitu sekitar 12 pekerja. Kemudian kategori Pendidikan dengan rata-rata 9 tenaga kerja per usaha. Sementara UMK kategori lainnya rata-rata mampu menyerap sekitar 2 pekerja. Secara umum rata-rata penyerapan tenaga kerja UMK di Jawa Barat hanya sebesar 2 pekerja.

Tabel 4. Jumlah Usaha, Tenaga Kerja dan Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Non Pertanian Menurut Kategori di Jawa Barat, 2016

Kategori	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	2.156.577	3.981.293	2
C. Industri Pengolahan	600.720	1.673.252	3
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	860.312	1.569.177	2
P. Pendidikan	89.409	825.579	9
RS. Jasa Lainnya	181.017	403.469	2
H. Pengangkutan dan pergudangan	295.782	357.279	1
Kategori Lainnya	77.715	220.203	3
F. Konstruksi	18.216	214.671	12
J. Informasi Dan Komunikasi	121.387	184.134	2
MN. Jasa Perusahaan	54.241	155.412	3
L. Real Estat	90.498	117.926	1

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

B.2.3 UMK di Kelola secara Sederhana

Penyerapan tenaga kerja yang besar UMK di Indonesia memiliki karakteristik informal, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh UMK. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja dan UMK adalah menjalin kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar untuk mendapatkan pembinaan, bantuan modal, maupun lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMK sekaligus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari data SE2016 menunjukkan bahwa pengelolaan UMK dilakukan secara sederhana tercermin dari status badan hukumnya, pencatatan keuangan, dan penggunaan komputer. Di Jawa Barat, jumlah UMK yang tidak berbadan hukum masih sangat mendominasi yaitu mencapai 95,15 persen.



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 4.8. Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Badan Hukum, 2016

Mayoritas UMK juga belum menggunakan komputer dan memanfaatkan internet. Komputer dan internet tidak hanya bermanfaat untuk melakukan laporan keuangan, juga bermanfaat untuk mendesain produk, pemasaran dan lain-lain. UMK yang menggunakan komputer dan memanfaatkan internet dibawah 11 persen. Untuk meningkatkan pendapatan UMK sekaligus meningkatkan daya saing produknya, kemitraan menjadi salah satu cara yang tepat. Namun demikian, usaha ini masih belum menjadi pilihan bagi UMK. Keterbatasan informasi menjadi salah satu kendala untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Hanya sekitar 6,97 persen UMK yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain. Di antara sektor Nonpertanian di Jawa Barat, UMK Aktivitas Pendidikan; Aktivitas Keuangan dan Asuransi; dan Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial yang pengelolaannya paling baik. Hal ini tercermin dari variabel-variabel status badan usaha, penggunaan internet, dan penggunaan komputer. Sementara dari aspek menjalin kemitraan, hampir semua kategori belum menjalin kemitraan secara optimal.

B.2.4 Pelaku UMK Mayoritas Perorangan

Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan sistem manajemen pembagian tugas yang baik. Namun, sebagian besar usaha dilakukan secara perorangan. Karena skala usaha yang kecil dan pengelolaannya dilakukan secara sederhana, seluruh proses usaha atau produksi sampai pemasaran dilakukan sendiri oleh pengelola atau pengusaha. Selain itu, masih banyak UMK yang dibantu oleh pekerja keluarga/tidak dibayar. Hasil data SE2016-Lanjutan menunjukkan sekitar 21,13 persen UMK dibantu oleh pekerja keluarga/tidak dibayar. Kategori yang paling banyak dibantu buruh tidak dibayar adalah aktivitas Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I). Peranan UMK dalam menggerakkan perekonomian tidak terlepas dari peran perempuan baik sebagai pengusaha maupun tenaga kerja. Secara umum, persentase pengusaha UMK yang berjenis kelamin perempuan 37,12 persen. Meskipun masih rendah dari laki-laki, persentase ini dianggap cukup tinggi mengingat masih berlakunya norma jika laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah. Berpijak dengan hal tersebut dapat diduga jika UMK juga dijalankan sebagai penunjang perekonomian keluarga. Secara umum kualitas pendidikan pengelola UMK masih rendah. Hampir 50 persen pengelola berpendidikan SD ke bawah, paling besar diantara jenjang pendidikan lainnya. Pengelola dengan pendidikan SMA juga cukup besar mencapai 24,42 persen. Masih rendahnya pendidikan pengelola UMK menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha ini seperti pelatihan-pelatihan.

B.2.5 Kinerja Usaha dari Sisi Keuangan

Kinerja usaha merupakan hasil dari kegiatan pemanfaatan sumber daya suatu usaha yang dapat diukur dengan beragam cara, salah satunya adalah laba usaha. Berdasarkan data hasil SE2016 Lanjutan, perolehan laba Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menunjukkan kondisi yang stabil. Namun, sekitar 30,38 persen UMK di Jawa Barat menyatakan bahwa keuntungan usaha mereka di tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercatat, sektor UMK secara keseluruhan mampu menghasilkan pendapatan mencapai lebih dari Rp 916 triliun. Selain laba usaha, rasio cost to income juga digunakan untuk melihat tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu usaha maka semakin baik atau semakin menguntungkan usaha tersebut. Pada infografis dapat terlihat bahwa UMK pada kategori L (Real Estat) merupakan kategori lapangan usaha yang paling menguntungkan dengan rasio sebesar 0,28. Selanjutnya, Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) berada di urutan ke dua usaha yang menguntungkan dengan rasio 0,33. Namun demikian, Kategori, D, L, ,N, R dan S bukanlah usaha yang memberikan rata-rata balas jasa pekerja yang tertinggi. Di Jawa Barat, aktivitas Konstruksi memiliki nilai balas jasa pekerja tertinggi, yaitu sekitar 25,54 juta per pekerja pada tahun 2017. Selanjutnya, Kategori Q (Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial) memberikan balas jasa mencapai 24,24 juta per pekerja pada tahun yang sama.



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 4.9. Rasio Pendapatan terhadap pengeluaran Menurut Lapangan Usaha, 2017

B.3. Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang berdaya saing di Propinsi Jawa Barat untuk menghadapi era industri 4.0

1. Faktor Internal

(a) Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan Internal

Identifikasi faktor strategi internal berupa kekuatan dan kelemahan yang berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang berdaya saing di propinsi Jawa Barat sebagaimana terlihat pada tabel 5.

Tabel 5. Kekuatan dan Kelemahan Internal

No.	Kekuatan (<i>Strenghts</i>)	No.	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
1	UMK mendominasi Usaha di Propinsi Jawa Barat	1	Masih Banyak UMK belum berbadan Hukum
2	Didominasi oleh Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2	Penggunaan Komputer yang masih rendah
3	Penyediaan dan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	3	Belum Memaksimalkan Pemasaran Online
4	Usaha Industri Pengolahan	4	Kurang menjalin kemitraan
5	Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	5	Secara umum kualitas pendidikan pengelola UMK masih rendah
6	UMK merupakan salah satu wadah paling tepat menampung tenaga kerja yang tidak memiliki skill tinggi.	6	Kurang Tahu Bagaimana Cara Membesarkan Bisnis

7	UMK Sebagai penyerap Tenaga Kerja terbanyak	7	Masih Mengandalkan Pembukuan Secara Manual
8	Peran Perempuan dalam menggerakkan perekonomian cukup besar dianggap sebagai penunjang perekonomian keluarga	8	Keterbatasan Informasi menjadi kendala menjalin kemitraan dengan perusahaan besar.
9	Kinerja Usaha yang paling baik adalah Real Estate	9	Pengusaha UMK di dominasi oleh lulusan SD
10	UMK Konstruksi memiliki penyerapan tenaga kerja paling besar	10	Kinerja usaha yang paling jelek adalah aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas Sosial atau pendidikan
		11	Kualitas Produk yang masih rendah
		12	Kurangnya Inovasi Produk
		13	Rendahnya kemampuan dalam bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia;
		14	Terciptanya iklim usaha yang kurang kondusif, karena cenderung berkembang kearah persaingan yang saling mematikan;

(b) Evaluasi Faktor Lingkungan Internal

Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah identifikasi faktor lingkungan internal berupa penyusunan matriks IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) untuk mendapatkan nilai skor. Nilai skor tersebut merupakan hasil penjumlahan total dari hasil perkalian bobot dengan rating masing-masing indikator faktor strategis internal. Pembobotan dilakukan dengan mengklasifikasikan setiap indikator sesuai dengan kepentingan atau rating, sehingga dapat diperoleh bobot dari masing-masing indikator strategis internal (kekuatan dan kelemahan). Matriks IFAS dapat dilihat pada Tabel 2. Total skor yang diperoleh pada Matriks IFAS sebesar 4,49 yang menunjukkan bahwa faktor lingkungan internal berada pada tingkat kepentingan baik. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pengembangan koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang berdaya saing dapat mengendalikan faktor lingkungan internalnya (kekuatan dan kelemahan) serta dapat menunjang dalam pengembangannya.

Tabel 6. Matriks IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*)

No.	Faktor Internal	Bobot	Rating	Score
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	1 UMK mendominasi Usaha di Propinsi Jawa Barat	0.08	5	0.4
	2 Mendominasi pertama oleh Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan Mobil dan Sepeda Motor	0.04	5	0.2
	3 Mendominasi ke dua Penyediaan dan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	0.03	4	0.12
	4 Mendominasi ke tiga Usaha Industri Pengolahan	0.02	3	0.06
	5 Mendominasi ke empat Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	0.01	3	0.03
	6 UMK merupakan salah satu wadah paling tepat menampung tenaga kerja yang tidak memiliki skill tinggi.	0.03	4	0.12
	7 UMK Sebagai penyerap Tenaga Kerja terbanyak	0.07	5	0.35
	8 Peran Perempuan dalam menggerakkan perekonomian cukup besar dianggap sebagai penunjang perekonomian keluarga	0.04	5	0.2
	9 Kinerja Usaha yang paling baik adalah Real Estate	0.05	3	0.15
	10 UMK Konstruksi memiliki penyerapan tenaga kerja paling besar	0.07	5	0.35
Total Kekuatan		0.44		1.98
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	1 Masih Banyak UMK belum berbadan Hukum	0.06	5	0.3
	2 Penggunaan Komputer yang masih rendah	0.05	5	0.25
	3 Belum Memaksimalkan Pemasaran Online	0.07	5	0.35
	4 Kurang menjalin kemitraan	0.03	4	0.12
	5 Secara umum kualitas pendidikan pengelola UMK masih rendah	0.02	3	0.06
	6 Kurang Tahu Bagaimana Cara Membesarkan Bisnis	0.03	4	0.12
	7 Masih Mengandalkan Pembukuan Secara Manual	0.03	4	0.12
	8 Keterbatasan Informasi menjadi kendala menjalin kemitraan dengan perusahaan besar.	0.04	3	0.12
	9 Pengusaha UMK di dominasi oleh lulusan SD	0.03	5	0.15
	10 Kinerja usaha yang paling jelek adalah aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas Sosial atau pendidikan	0.02	5	0.1
	11 Kualitas Produk yang masih rendah	0.04	3	0.12
	12 Kurangnya Inovasi Produk	0.02	5	0.1
	13 Rendahnya kemampuan dalam bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia;	0.06	5	0.3
	14 Terciptanya iklim usaha yang kurang kondusif, karena cenderung berkembang kearah persaingan yang saling mematikan;	0.06	5	0.3
Total Kelemahan		0.56		2.51
Total S + W		1		4.49

2. Faktor Eksternal

(a) Identifikasi Peluang dan Ancaman

Faktor strategis eksternal meliputi faktor peluang dan ancaman. Identifikasi faktor-faktor peluang dan ancaman ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor peluang dan ancaman yang berpengaruh terhadap keberlangsungan pengembangan ayam Sentul di Kabupaten Ciamis. Faktor-faktor peluang dan ancaman eksternal yang dapat diidentifikasi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 7. Peluang dan Ancaman Eksternal

No.	Peluang (<i>Opportunities</i>)	No.	Ancaman (<i>Threats</i>)
1	Penggunaan teknologi digital dan pemanfaatan Jaringan Internet yang semakin mudah sehingga memudahkan koperasi dan UMK menjangkau pasar terluas.	1	Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyebabkan persaingan semakin terbuka
2	Pihak perbankan memberikan literasi keuangan mikro dan membuat kebijakan yang tidak memberatkan pelaku usaha.	2	Memiliki akses terbatas pada pendanaan / pembiayaan modal usaha
3	Mudah mendapatkan tenaga kerja karena pencari kerja di dominasi oleh tamatan SMA/SMK	3	Ancaman Penutupan Medsos UMKM
4	Semakin maraknya perbankan syariah yang lebih merakyat seperti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	4	Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS
5	Jaminan dari pemerintah untuk mendirikan sebuah institusi untuk menjamin pinjaman dalam upaya membiayai usaha kecil.	5	Downtime sistem atau gangguan sistem kegagalan sistem UPS (25 persen), serangan siber (22 persen), human error (22 persen), dan kegagalan generator (6 persen)
6	Adanya standarisasi produk Koperasi dan UMK untuk pasar domestik dan pasar ekspor.		
7	Dukungan pemerintah melalui kementerian Koperasi dan UMKM yang memiliki program prioritas Peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi.		

(b) Evaluasi Faktor Lingkungan Eksternal

Evaluasi faktor lingkungan eksternal dilakukan dengan menggunakan Matriks EFAS sebagaimana terlihat pada Tabel 8. Total skor yang diperoleh pada Matriks EFAS sebesar 4,07

Tabel 8. Matriks EFAS (Eexternal Factors Analysis Summary)

No.	Faktor Internal	Bobot	Rating	Score
<i>Peluang (Opportunities)</i>	1 Penggunaan teknologi digital dan pemanfaatan Jaringan Internet yang semakin mudah sehingga memudahkan koperasi dan UMK menjangkau pasar terluas.	0.09	5	0.45
	2 Pihak perbankan memberikan literasi keuangan mikro dan membuat kebijakan yang tidak memberatkan pelaku usaha.	0.06	3	0.18
	3 Mudah mendapatkan tenaga kerja karena pencari kerja di dominasi oleh tamatan SMA/SMK	0.08	4	0.32
	4 Semakin maraknya perbankan syariah yang lebih merakyat seperti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	0.04	2	0.08
	5 Jaminan dari pemerintah untuk mendirikan sebuah institusi untuk menjamin pinjaman dalam upaya membiayai usaha kecil.	0.05	2	0.1
	6 Adanya standarisasi produk Koperasi dan UMK untuk pasar domestik dan pasar ekspor.	0.05	3	0.15
	7 Dukungan pemerintah melalui kementerian Koperasi dan UMKM yang memiliki program prioritas Peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi.	0.09	5	0.45
Total Peluang		0.46		1.73
<i>Ancaman (Threats)</i>	1 Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyebabkan persaingan semakin terbuka	0.16	5	0.8
	2 Memiliki akses terbatas pada pendanaan / pembiayaan modal usaha	0.06	3	0.18
	3 Ancaman Penutupan Medsos UMKM	0.08	2	0.16
	4 Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS	0.18	5	0.9
	5 Downtime sistem atau gangguan sistem kegagalan sistem UPS (25 persen), serangan siber (22 persen), human error (22 persen), dan kegagalan generator (6 persen)	0.06	5	0.3
Total Ancaman		0.54		2.34
Total O + T		1		4.07

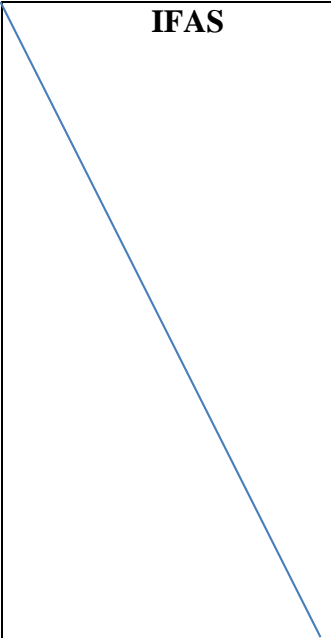
3. Analisis SWOT

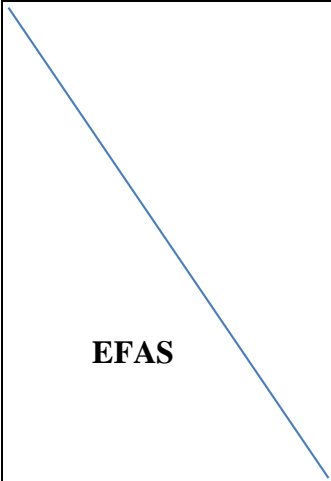
Berdasarkan aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, maka dapat disusun beberapa alternatif strategi pengembangan Koperasi dan UMK yang berdaya saing, aspek-aspek internal dan eksternal dikombinasikan dan disusun dalam matriks SWOT yang dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks SWOT yang biasa disebut Matriks Internal dan Eksternal (IE), Secara garis besar terdapat 3 jenis strategi dalam analisis matrik IE sebagai berikut:

- 1) Growth strategy yang merupakan pertumbuhan atau upaya diversifikasi.
- 2) Stability strategy adalah strategi yang diterapkan tanpa mengubah arah strategi yang telah ditetapkan .
- 3) Retrenchment strategy adalah usaha memperkecil mengurangi usaha yang dilakukan .

Penjabarannya dapat dilihat pada Tabel 9.

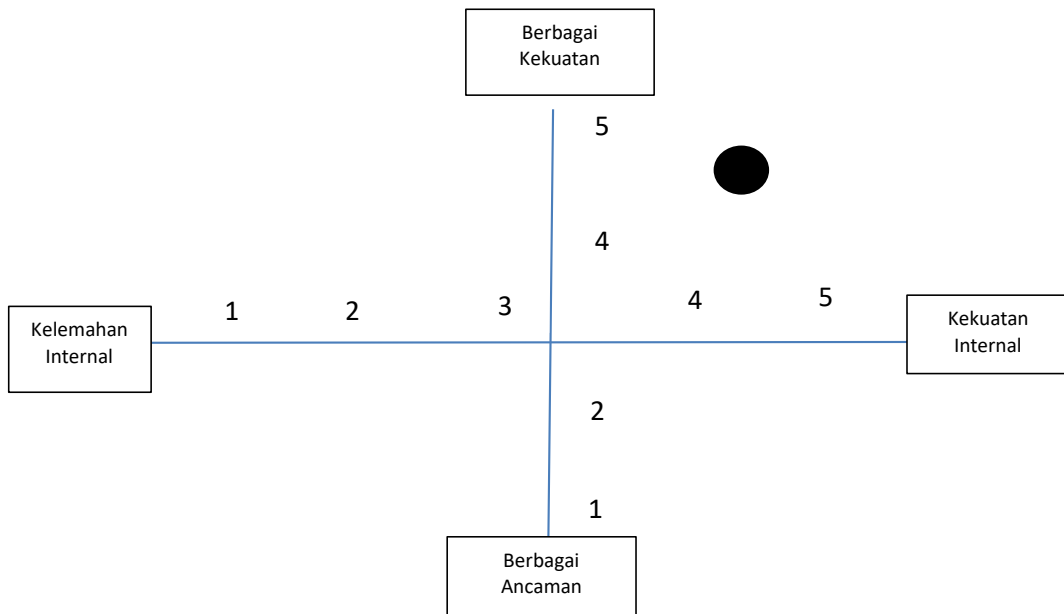
Tabel 9. Penjabaran IFAS dan EFAS

IFAS	Kekuatan (S)	Kelemahan(W)
	1. UMK mendominasi Usaha di Propinsi Jawa Barat (S1)	1. Masih Banyak UMK belum berbadan Hukum (W1)
	2. Mendominasi pertama oleh Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan Mobil dan Sepeda Motor (S2)	2. Penggunaan Komputer yang masih rendah (W2)
	3. Mendominasi ke dua Penyediaan dan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (S3)	3. Belum Memaksimalkan Pemasaran Online (W3)
	4. Mendominasi ke tiga Usaha Industri Pengolahan (S4)	4. Kurang menjalin kemitraan (W4)
	5. Mendominasi ke empat Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (S5)	5. Secara umum kualitas pendidikan pengelola UMK masih rendah (W5)
	6. UMK merupakan salah satu wadah paling tepat menampung tenaga kerja	6. Kurang Tahu Bagaimana Cara Membesarkan Bisnis (W6)
		7. Masih Mengandalkan Pembukuan Secara Manual (W7)
		8. Keterbatasan Informasi menjadi kendala menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. (W8)
		9. Pengusaha UMK di dominasi oleh lulusan SD (W9)
		10. Kinerja usaha yang paling jelek adalah aktivitas kesehatan

 <p style="text-align: center;">EFAS</p>	<p>yang tidak memiliki skill tinggi. (S6)</p> <p>7. UMK Sebagai penyerap Tenaga Kerja terbanyak (S7)</p> <p>8. Peran Perempuan dalam menggerakkan perekonomian cukup besar dianggap sebagai penunjang perekonomian keluarga (S8)</p> <p>9. Kinerja Usaha yang paling baik adalah Real Estate (S9)</p> <p>10. UMK Konstruksi memiliki penyerapan tenaga kerja paling besar (S10)</p>	<p>manusia dan aktivitas Sosial atau pendidikan (W10)</p> <p>11. Kualitas Produk yang masih rendah (W11)</p> <p>12. Kurangnya Inovasi Produk(W12)</p> <p>13. Rendahnya kemampuan dalam bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia; (W13)</p> <p>14. Terciptanya iklim usaha yang kurang kondusif, karena cenderung berkembang kearah persaingan yang saling mematikan (W14)</p>
<p style="text-align: center;">Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan teknologi digital dan pemanfaatan Jaringan Internet yang semakin mudah sehingga memudahkan koperasi dan UMK menjangkau pasar terluas. (O1) 2. Pihak perbankan memberikan literasi keuangan mikro dan membuat kebijakan yang tidak memberatkan pelaku usaha. (O2) 3. Mudah mendapatkan tenaga kerja karena pencari kerja di dominasi oleh tamatan SMA/SMK(O3) 4. Semakin maraknya perbankan syariah yang lebih merakyat seperti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) (O4) 5. Jaminan dari pemerintah untuk mendirikan sebuah institusi untuk menjamin pinjaman dalam upaya membiayai usaha kecil. (O5) 6. Adanya standarisasi produk Koperasi dan UMK untuk pasar domestik dan pasar ekspor. (O6) 7. Dukungan pemerintah melalui kementerian Koperasi dan UMKM yang memiliki program prioritas Peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi. (O7) 	<p style="text-align: center;">Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Manajerial, Produk dan Layanan (S2,S4,S5,O6) 2. Peningkatan penggunaan Teknologi digital dalam memperluas akses (S3,O1) 3. Peningkatan Kerjasama dengan perbankan dalam memperbesar modal usaha (S1,O2,O4) 4. Membangun jaringan yang kuat dengan pemerintah dan pasar tenaga kerja (S6,S7,S9,S10,O3,O5) 5. Meningkatkan peran Pemerintah dan Peran wanita dalam pembangunan ekonomi. (S8,O7) 	<p style="text-align: center;">Strategi W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaganya Koperasi dan UMK yang Legal dan memanfaatkan digital pemasaran. (O1,W1,W2,W3,W7,W8) 2. Menjaga hubungan baik dengan pelaku usaha, pemerintah dan konsumen (O2,O7,W4) 3. Terjaganya kerjasama yang baik dengan pihak perbankan dan pemerintah.(O2,O4,O5,W13) 4. Terjaganya kualitas pengelolaan dna kebutuhan tenaga kerja untuk mengantisipasi pasar tenaga kerja tingkat SMA/SMK (O3,W9,W14) 5. Terjaganya Standarisasi Produk dan Peran serta pemerintah dalam meningkatkan daya saing.(O6,O7,W5,W6,W10,W11, W12)
<p style="text-align: center;">Ancaman (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyebabkan persaingan semakin terbuka (T1) 	<p style="text-align: center;">Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Kerjasama antar koperasi dan UMK di ASEAN.(T1,S1,S2,S3,S5) 	<p style="text-align: center;">Strategi W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kerjasama Pameran produk bersama se ASEAN guna pertukaran ilmu pengetahuan dan pengalaman dan kerjasama dengan

<ol style="list-style-type: none"> 2. Memiliki akses terbatas pada pendanaan / pembiayaan modal usaha (T2) 3. Ancaman Penutupan Medsos UMKM (T3) 4. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS (T4) 5. Downtime sistem atau gangguan sistem kegagalan sistem UPS (25 persen), serangan siber (22 persen), human error (22 persen), dan kegagalan generator (6 persen) (T5) 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan Akses pendanaan dengan Perbankan dan Industri pengolahan (T2,S4) 3. Meningkatkan Kerjasama dengan Pemerintah berkaitan dengan Pemanfaatan Media Sosial dan Jaminan dampak pelemahan Rupiah (T3,T4,S1) 4. Meningkatkan kualitas layanan dan Peran Masyarakat(T5,S8,S9) 5. Meningkatkan Jumlah Tenaga kerja Skill Rendah(S6, S7,S10) 	<p>pemerintah berkaitan dengan perizinan.(T1,W1,W2,W3,W4,W5, W8)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kerjasama pembiayaan dari perbankan, pelatihan dan pengembangan dan perluasan pasar melalui pemanfaatan Internet.(T2,W6,W7,W9) 3. Melakukan kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha lainnya dan meningkatkan kualitas pengelolaan usaha. (T5,W10) 4. Mengurangi gangguan sistem pada pelayanan secara online dengan pihak pemerintah.(T3,W14) 5. Melaksanakan Kerjasama Pelatihan, Pengelolaan usaha, peningkatan kualitas Produk, inovasi dengan kementerian koperasi dan UMKM (T4,W11,W12,W13)
---	---	---

Apabila digambarkan dalam bentuk kuadran SWOT matrik IE di atas sebagai berikut:



Gambar 4.10. Kuadran SWOT

Gambaran hasil Matrik IE dan kuadran SWOT di atas adalah menggambarkan Koperasi dan UMK memanfaatkan kekuatan dari peluang yang dimiliki (SO Strategy) dan gambaran Koperasi dan UMK mengatasi kelemahan dari peluang yang ada (WO Strategy). Selanjutnya bagaimana Koperasi dan UMK memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman yang ada (ST Strategy), dan terakhir adalah bagaimana Koperasi dan UMK mengatasi kelemahan yang mampu

menjadi ancaman (WT Strategy). Adapun dari hasil analisis IFAS & EFAS yang dapat diambil Koperasi dan UMK adalah strategi pertumbuhan (Growth Strategy) yaitu SO dan ST Strategy.

1). SO Strategi meliputi :

- a) Meningkatkan Kualitas Manajerial, Produk dan Layanan
- b) Peningkatan penggunaan Teknologi digital dalam memperluas akses
- c) Peningkatan Kerjasama dengan perbankan dalam memperbesar modal usaha
- d) Membangun jaringan yang kuat dengan pemerintah dan pasar tenaga kerja.
- e) Meningkatkan peran Pemerintah dan Peran wanita dalam pembangunan ekonomi.

1). ST Strategi meliputi :

- a) Meningkatkan Kualitas Kerjasama antar koperasi dan UMK di ASEAN
- b) Meningkatkan Akses pendanaan dengan Perbankan dan Industri pengolahan
- c) Meningkatkan Kerjasama dengan Pemerintah berkaitan dengan Pemanfaatan Media Sosial dan Jaminan dampak pelemahan Rupiah
- d) Meningkatkan kualitas layanan dan Peran Masyarakat
- e) Meningkatkan Jumlah Tenaga kerja Skill Rendah

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dengan analisis SWOT dan pembahasan dapat dikemukakan kesimpulan dan rekomendasi yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian tentang pengembangan koperasi dan UMK yang berdaya saing dalam menghadapi era industri 4.0 di propinsi Jawa Barat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Koperasi di propinsi Jawa Barat berjumlah 24.048 yang tersebar di 27 kabupaten kota, yang paling banyak di kota bandung 2.577 dan paling sedikit Kota banjar 165, dan yang paling aktif Kabupaten Karawang dan yang paling tidak aktif Kabupaten Cirebon dan 73% dikuasai oleh koperasi Konsumen.
2. Usaha Mikro Kecil (UMK) berjumlah 4,5 Juta usaha atau 98.84 persen non pertanian. UMK yang Paing mendominasi adalah Perdagangan besar dan eceran, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum serta Industri Pengolahan sedangkan yang paling sedikit adalah Jasa Perusahaan dan Pendidikan. UMK yang paling banyak terdapat di Kota Bogor, Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. UMK merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak yaitu 9 juta tenaga kerja dan UMK penyerap tenaga kerja terbanyak dari perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil, sepeda motor mencapai 3,98 Juta Jiwa.
3. Usaha Mikro Kecil (UMK) masih dikelola secara sederhana, hal ini terlihat pada kepemilikan usaha yang belum berbadan hukum, pemanfaatan internet yang masih rendah dan pengelolaan keuangan yang manual.

4. Matriks IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*) memperoleh Score 4.49 dan Matriks EFAS (*External Factors Analysis Summary*) memperoleh score 4.07 dan berada di kuadran I artinya satrategi yang digunakan adalah memanfaatkan kekuatan dari peluang yang dimiliki (SO Strategy) dan memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman yang ada (ST Strategy),

B. Saran

Dalam rangka menindaklanjuti penelitian ini, penulis mengemukakan rekomendasi terkait penelitian ini sebagai berikut :

1. Masih banyaknya koperasi dan UMK yang kurang aktif secara keseluruhan rata rata 62,60% masih bisa ditingkatkan, diharapkan peran serta dan kerja sama yang baik dari kementerian koperasi dan UMKM terus ditingkatkan terutama pembinaan pemanfaatan jaringan internet agar mampu bersaing dengan UMK lainnya di ASEAN dan Pembinaan pengelolaan Koperasi dan UMK yang bermutu.
2. Agar Meningkatkan kualitas pengelolaan dan sumberdaya manusianya yang melek teknologi terutama teknologi pemanfaatan internet agar mampu mengembangkan usahanya seluas mungkin.
3. UMK kategori Real Estat, Pendidikan dan Jasa Perusahaan terus dikembangkan agar ke depan mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.
4. Pemerintah turut berperan secara intents dalam membantu koperasi dan UMK agar usahanya di kelola secara profesional agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing di pasar global.
5. Koperasi dan UMK terus membangun kerjasama untuk membuka akses pendanaan dengan pihak perbankan dengan bunga rendah dan terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

- Claiborne, A., Buckley, E., Parsonage, D., Ross, R. P., & Ward, D. P. (1995). Molecular analysis of enterococcal loci involved in novel catabolic pathways. *Developments in Biological Standardization*, 85(1), 129–133.
- Hendar. (2010). *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta: Erlangga.
- Kagermann, H., Lukas, W.D., & Wahlster, W. (2011). *Industrie 4.0: Mit dem Internet der Dinge auf dem Weg zur 4. industriellen Revolution*. <http://www.vdi-nachrichten.com/Technik-Gesellschaft/Industrie-40-Mit-Internet-Dinge-Weg-4-industriellen-Revolution>, Diakses pada 17 Juni 2017.
- Kagermann, H., Lukas, W.D., & Wahlster, W. (2013). *Final report: ecommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0*. Industrie 4.0 Working Group.
- Prasetyo, H., & Sutopo, W. (2018). *Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset*. *J@ti Undip : Jurnal Teknik Industri*, 13(1), 17. <https://doi.org/10.14710/jati.13.1.17-26>
- Rathore, S., P. M. Desai, C. V. Liew, L. W. Chain, and P. W. S. Heng. 2013. Microencapsulation of microbial cells. *Journal of Food ngeeneering* 116: 369- 381.
- Suhartono, I. (2011). *Strategi Pengembangan Koperasi Berorientasi Bisnis*. *Jurnal.Stiema.Ac.Id*, 4(7), 33–47. Retrieved from https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN8vP3qevYAhVGvY8KHUhnAy0QFgg_MAM&url=http%3A%2F%2Fjurnal.stiema.ac.id%2Findex.php%2Fama%2Farticle%2Fdownload%2F32%2F29&usg=AOvVaw1ijZ86scKBYWTsYEFgOHIM
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- Z. Herlin Frinces (2011) *Be An Entrepreneur* (Jadilah seorang wirausaha) *Kajian Strategis Pengembangan Kewirausahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.